

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan kewenangan secara luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi secara luas, daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat harus menyampaikan laporan keuangan daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengungkapkan bahwa dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterapkan. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Pramono, 2014).

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, evaluasi kinerja (Pramono, 2014).

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD. (Rondonuwu dkk. 2015).

Meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai sebagaimana diamatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-

2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013. Fenomena yang terjadi adalah pelaksanaan kegiatan tahun 2013 mempunyai kendala/hambatan dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya hambatan antara lain: adanya pasar yang kurang representatif, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membayar retribusi dan kondisi perekonomian masyarakat pembayar yang belum stabil (Rahmayati, 2016).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo belum dilakukan adanya standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien. Maka, diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Dalam manajemen, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Mahsun (2013: 109) dalam Hanik dan Karyanti (2014) menyatakan bahwa berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasinya.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan

dalam suatu perusahaan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena dalam instansi/organisasi pemerintahan tidak berorientasikan laba (*net profit*). Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga kepada kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah (Hanik dan Karyanti, 2014).

Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo adalah melakukan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan *debt service coverage ratio* (DSCR) (Rahmayati, 2016). Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Hanik dan Karyanti, 2014).

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa ahli, antara lain Pramono (2014) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 sudah efektif, efisien, mengalami pertumbuhan positif serta memiliki

kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman. Namun demikian, tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surakarta masih rendah karena pendapatan daerah yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya.

Penelitian tentang kinerja keuangan daerah juga telah dilakukan oleh Mariani (2013). Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah efisien walaupun mengalami penurunan setelah terjadi pemekaran daerah, tetapi tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat. Sedangkan Azhar (2010) memperoleh hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebelum dan sesudah otonomi mengalami penurunan atau mengarah ke arah yang lebih buruk.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Hanik dan Karyanti (2014) dengan perbedaan penelitian adalah pada obyek yang diteliti yaitu pada DPPKAD Sukoharjo dengan periode penelitian dari tahun 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2011-2015.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti membuat perumusan masalah yaitu bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan analisis rasio keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2015 dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, menambah pemahaman penulis tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya, memberikan sumbangan wawasan dan sebagai bahan pembandingan terhadap penelitian akuntansi yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dengan sistematika penulisan untuk memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini yang terdiri dari lima bab. Adapun pembahasan penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini dibahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, serta pembahasan atau hasil analisis data.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan nantinya dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.